



RELASI JARINGAN ORGANISASI PEMUDA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

Muryanto Amin✉

Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Sumatera Utara

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2951>

Article History

Received : Desember 2013
Accepted : Januari 2014
Published : Maret 2014

Keywords

local bosses;
local politic;
power

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya para "preman" sebagai aktor lokal di Sumatera Utara yang berperan mendukung Syamsul Arifin sebagai calon Gubernur Sumatera Utara tahun 2008. Sebagian aktor lokal itu berasal dari kader Pemuda Pancasila. Mereka mengandalkan kekerasan dan uang yang dimiliki untuk memperoleh serta memaksimalkan akses sumber daya dari pemerintah daerah. Untuk menjelaskan model relasi jaringan yang digunakan Pemuda Pancasila sebagai modal memenangkan calon gubernur yang didukung, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus dan analisis tipologi dipilih sebagai cara untuk menyusun interpretasi atas data tertulis, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model relasi yang terjalin antara Pemuda Pancasila dengan birokrasi, pengusaha, dan media cetak lokal dilakukan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Jaringan relasi tersebut dilakukan dengan cara yang beragam, saling mengait, dan penuh intrik untuk mempertahankan akses kekuasaan dan memanfaatkan sumber daya yang dikuasai. Pemuda Pancasila tetap ingin memperoleh akses sumber daya yang dikuasai negara di tingkat lokal. Sementara, para pejabat birokrasi, pengusaha, dan pengelola media cetak lokal membutuhkan kekuatan Pemuda Pancasila untuk mempertahankan kekuasaan dan usaha mereka seperti menghindari ancaman dan menjaga keamanan di lokasi-lokasi kekuasaan dan usaha mereka.

NETWORK RELATIONS OF YOUTH ORGANITATION IN GOVERNOR ELECTION NOTRH SUMATERA

Abstrak

The background of this study is the emergence of "gangsters"—some of whom were cadres of Pemuda Pancasila—as local actors who played an important role to support Syamsul Arifin as governor candidates in North Sumatera. They rely intimidated with violence and money to gain access resources from the local government and maximize them. This study used qualitative methods that would explain network relation models of Pemuda Pacasila used as capital backed winning candidate for governor. The qualitative analysis with typology technique is chosen as a way to arrange interpretations on data—written materials, in depth interviews, and observations. The findings showed that the network relation models among Pemuda Pancasila, bureaucracy, businessman, and local print media was performed based on mutualistic symbiosis. Interwoven network of relationships is done in stepwise manner, interlocking, full of intrigue, and power to maintain access and utilize resources owned. Pemuda Pancasila still want to gain resources access that local state controlled. While bureaucrats, businessman, and local media managers need strength of Pemuda Pancasila to maintain their power and attempt to avoid such threats and security at sites and their efforts.

✉ Corresponding author :

Address: Jl. Dr. A. Sofian No. 1 Medan-20122

E-mail: muryantomin@yahoo.com

Telp/Fax: 061-8221346

PENDAHULUAN

Amandemen konstitusi setelah jatuhnya Orde Baru merupakan salah satu wujud dari gerakan reformasi tahun 1998. Sejak itu, bangsa Indonesia memasuki fase kehidupan politik yang lebih terbuka dan demokratis serta ditandai dengan pulihnya hak-hak sipil dan politik. Perubahan mendasar yang terjadi dalam amandemen UUD 1945 di antaranya adalah rekrutmen pejabat negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum legislatif dan eksekutif pada tingkat nasional maupun lokal. Terakomodasinya berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan derajat penerimaan atas keputusan yang dibuat pemerintah (Prasodjo, 2006).

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif tersebut, terdapat beberapa prasyarat dasar yang harus tersedia, antara lain adanya kesetaraan politik (Lively, 1975) dan akuntabilitas lokal yang memadai. Tetapi keduanya menjadi sebagian permasalahan mendasar yang dihadapi banyak negara berkembang dalam menerapkan desentralisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan desentralisasi tidak selalu memiliki korelasi positif dengan konsolidasi demokrasi maupun efisiensi struktural pemerintahan di tingkat lokal (Crook and Manor, 1998).

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara sangat memungkinkan akumulasi kekuasaan berada pada para aktor dan kelompok tertentu di tingkat lokal. Meskipun peraturan tentang pelaksanaan otonomi daerah telah menjamin setiap warga memiliki kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya sehingga diharapkan konsolidasi demokrasi dapat berjalan dan pemerintahan terselenggara secara efektif, namun dalam praktiknya di Sumatera Utara, muncul para preman lokal yang salah satunya berada di bawah kepemimpinan organisasi pemuda dan penyedia jasa keamanan. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pengusaha, politisi dan selalu mengambil peran dalam memobilisasi dukungan dalam pemilihan gubernur.

Para kader dan tokoh Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, yang sering disebut 'preman', tidak hanya mengandalkan anca-

man dan intimidasi untuk melakukan kekerasan serta uang yang dimiliki. Di antara mereka juga menguasai partai politik, legislatif, birokrasi, lembaga bisnis, dan media cetak lokal untuk memenuhi kepentingannya. Dalam kapasitas menggunakan jaringan tersebut, tentunya mereka sangat kuat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya dari pemerintah daerah dan akan memaksimalkan sumber kekuasaan yang dimiliki (Hadiz, 2005). Sementara dalam kapasitasnya sebagai 'preman', mereka dapat juga menggunakan ancaman dan intimidasi untuk melakukan kekerasan.

Asumsi awal tentang peran yang dilakukan oleh kader dan tokoh Pemuda Pancasila seperti yang dijelaskan di atas, pada praktiknya akan dilihat dan dianalisis saat berlangsungnya pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Terpilihnya pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pudjonugroho sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2008-2013, tidak terlepas dari peran Pemuda Pancasila. Peran yang dimaksud adalah selain mengandalkan kemampuan melakukan intimidasi dengan ancaman kekerasan fisik serta mengandalkan uang yang dimilikinya, tokoh Pemuda Pancasila juga menggunakan pengaruhnya terhadap jaringan politik yang mereka miliki untuk bekerja memenangkan calon yang didukung dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008.

Untuk menguji asumsi tentang adanya peran Pemuda Pancasila dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 tersebut, maka penelitian ini akan menjawab sejumlah pertanyaan berikut. *Pertama*, seperti apakah bentuk intimidasi yang dilakukan Pemuda Pancasila dalam mendukung Syamsul Arifin dan Gatot Pudjonugroho dalam pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008? *Kedua*, bagaimana pola mobilisasi kader dan tokoh Pemuda Pancasila yang menjadi pimpinan partai politik dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung calon gubernur dan wakil gubernur yang ingin dimenangkan? *Ketiga*, bagaimana model relasi jaringan yang dibangun antara pimpinan Pemuda Panca-

sila Sumatera Utara dengan pejabat birokrasi, pengusaha, dan pengelola media massa lokal di Sumatera Utara saat berlangsungnya pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008?

Terungkapnya alasan-alasan anggota Pemuda Pancasila untuk mengintimidasi para pemilih mendukung calon gubernur yang ingin dimenangkan, maka akan terlihat model relasi jaringan yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila. Model tersebut akan menjelaskan posisi pengaruh kekuasaan kader dan tokoh Pemuda Pancasila pada lembaga politik lokal dalam konteks pola hubungan negara-masyarakat (*state-society*) di Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian (Yin, 2000). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh. Data yang didapat baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara mendalam dan observasi akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi (Bogdan & Steven, 1993). Menghindari atau meminimalisasi kemungkinan adanya bias, maka penulis berusaha mencocokkan hasil wawancara antara satu nara sumber dengan yang lainnya kemudian dari dokumen-dokumen yang ditemukan tentang keterkaitan Pemuda Pancasila dengan kelompok-kelompok lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan anak jalanan dan preman yang ada di Sumatera Utara direkrut oleh IPKI untuk menjadi organisasi sayap pemuda yang bernama Pemuda Pancasila. Kehadiran Pemuda Pancasila sejak 1960 lebih mudah diterima di kalangan preman serta diharapkan akan mengarahkan mereka dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang terencana dan terprogram. Mengandalkan kekuatan otot, kekerasan dan kemudahan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada anggota Pemuda Pancasila, beberapa preman menemukan jati dirinya sebagai tokoh

lokal yang berpengaruh di Sumatera Utara sejak Orde Baru hingga pascareformasi.

Perluasan pengaruh para tokoh Pemuda Pancasila itu terlihat dari peran mereka saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Dengan cara yang sangat terbuka mereka menampilkan otoritas yang dimilikinya pada proses pemilihan gubernur tersebut. Syamsul Arifin-Gatot Pudjonugroho (Syampurno) adalah pasangan yang ingin dimenangkan oleh MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara di antara 4 pasangan calon lainnya. Para sesepuh Pemuda Pancasila, memerintahkan Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara mendukung Syamsul Arifin sebagai calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Dukungan yang diberikan tidak terlepas dari kepentingan ekonomi yang telah mereka kuasai di Sumatera Utara.

Intimidasi yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara terlihat dalam setiap tahapan pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Pada saat memberikan dukungan kepada calon gubernur yang ingin dimenangkan, bentuk intimidasi yang dilakukan adalah mengancam ketua tim pemenangan Syampurno agar memberikan sejumlah uang untuk kegiatan pemenangan yang dilakukan Pemuda Pancasila jika ingin mendapatkan dukungan Pemuda Pancasila. Pada tahapan kampanye bentuk intimidasi yang dilakukan kepada anggota organisasi adalah memberikan instruksi tentang sanksi berupa pemecatan dan ancaman pemukulan fisik bagi kader Pemuda Pancasila yang tidak mendukung calon gubernur yang ingin dimenangkan.

Sedangkan secara eksternal, anggota Pemuda Pancasila di lingkungannya masing-masing mengawasi para pemilih untuk memilih Syampurno dan memberi ancaman fisik kepada pemilih yang tidak memilih Syampurno. Pada masa tenang membagikan paket sembako seperti beras, minyak goreng, dan uang kepada para pemilih yang membutuhkannya dan diharuskan memilih Syamsul Arifin dalam pemilihan gubernur. Mereka yang mendapatkan paket sembako tersebut diancam akan menerima pemukulan fisik jika tidak memilih Syamsul Arifin.

Pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, anggota Pemuda Pancasila diperintahkan untuk menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah masing-masing agar para pemilih memilih Syampurno. Bentuk penjagaan itu adalah menyuruh dan memaksa para pemilih untuk memilih Syampurno. Selain bertugas sebagai pengawas, anggota Pemuda Pancasila juga diberi tugas sebagai saksi di TPS agar menjaga dan bila perlu menambah perolehan suara Syampurno.

Cara-cara kekuasaan yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam mendukung Syamsul Arifin dan Gatot Pujonugoroho sebagai calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 sesuai yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo yaitu penggunaan kekuatan fisik (Budiardjo, 1984). Kekuatan fisik berupa intimidasi, ancaman, dan bahkan menyakiti secara fisik untuk mengikuti perintah seseorang kepada orang lain juga dikemukakan oleh Andrain (1992). Kedua teori tersebut relevan menjelaskan peristiwa pemberian dukungan kepada calon gubernur yang ingin dimenangkan oleh organisasi pemuda di Sumatera Utara.

Teori yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf tentang cara paksaan dalam mempertahankan kekuasaan masih relevan menjelaskan temuan studi ini (Rauf, 2005). Sedangkan merujuk teori yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, maka cara yang dipraktekkan oleh tokoh Pemuda Pancasila Sumatera Utara adalah dominasi atau penindasan (Gramsci, 1971). Para anggota Pemuda Pancasila dan sebagian masyarakat di Sumatera Utara tunduk dan patuh pada tokoh Pemuda Pancasila bukan karena rasa hormat tetapi karena rasa takut.

Pola mobilisasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila untuk menggerakkan potensi organisasi dalam mendukung kandidat gubernur dibagi atas dua lapisan. *Pertama*, mobilisasi untuk lapisan bawah atau anggota Pemuda Pancasila. Setiap anggota Pemuda Pancasila diwajibkan mengikuti perintah dari pimpinan organisasi tanpa alasan apapun. Layaknya seperti organisasi militer, Pemuda Pancasila, juga menggu-

nakan sistem komando atau perintah dari komandan atau ketua organisasi. Tetapi sistem komando itu tidak akan berjalan tanpa biaya yang harus diberikan kepada anggota organisasi. Perintah atasan kepada bawahan untuk menggerakkan massa yang dilakukan atas dasar perhitungan uang, menjadi ciri hubungan patron-klien antara pimpinan yang disegani dengan anggotanya.

Kedua, mobilisasi dilakukan pada level elit Pemuda Pancasila dengan menggunakan pola hubungan patron-klien piramida seperti yang dikemukakan oleh Scott (1972). Untuk menggerakkan anggota Pemuda Pancasila dalam satu kegiatan diperlukan elit atau tokoh yang disegani oleh anggota. Masing-masing tokoh Pemuda Pancasila memiliki kepentingan yang beragam dan belum tentu keinginan seorang tokoh dapat diikuti oleh pengurus maupun anggota organisasi. Tetapi kepentingan seorang tokoh, yang tidak diperhatikan oleh pengurus dan anggota organisasi, akan mengganggu jalannya kepengurusan atau kegiatan organisasi yang dilakukan. Setidaknya seorang tokoh Pemuda Pancasila memiliki kekuatannya sendiri untuk menggerakkan anggota Pemuda Pancasila.

Pola mobilisasi yang relevan menjelaskan kondisi tersebut adalah teori Scott dan Maswadi Rauf yaitu pola hubungan antara tokoh Pemuda Pancasila dengan anak buahnya yang lebih bersifat personal, tidak seimbang, dan membutuhkan loyalitas yang tinggi. Tokoh Pemuda Pancasila memberikan berbagai sumber daya ekonomi dan perlindungan bagi anak buahnya. Mereka menerapkan bentuk patrimonialisme baru (*new patrimonialism*) dengan pola hubungan patron klien piramida (*patron-client pyramid*).

Upaya lain yang dilakukan Pemuda Pancasila adalah memanfaatkan lembaga birokrasi, pengusaha, dan media cetak lokal untuk memenangkan kandidat gubernur yang didukung. Jalinan relasi antara tokoh Pemuda Pancasila dengan birokrasi, pengusaha, serta media cetak lokal dilakukan dengan cara-cara yang beragam, saling mengait, dan penuh intrik untuk mempertahankan akses kekuasaan dan memanfaatkan

sumber-sumber daya yang dikuasai. Di satu sisi, tokoh Pemuda Pancasila tetap menginginkan akses sumber-sumber daya yang dikuasai negara di tingkat lokal (*local government resources*). Sementara di sisi lain, para pejabat birokrasi, pengusaha, dan pengelola media cetak lokal membutuhkan kekuatan Pemuda Pancasila untuk mempertahankan kekuasaan dan usaha mereka seperti menghindari ancaman dan menjaga keamanan di lokasi-lokasi kekuasaan dan usaha mereka. Oleh karena itu, relasi jaringan yang terjalin di antara mereka dilakukan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan. Bahkan kepentingan yang mereka miliki lebih bervariasi ketimbang masa Orde Baru. Keberhasilan mereka menjadi aktor politik lokal disebabkan karena kemampuannya untuk mendekatkan diri kepada tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat.

Pilihan Pemuda Pancasila kepada Syamsul Arifin sebagai calon gubernur dilakukan sangat kontekstual dengan kepentingan para tokoh Pemuda Pancasila. Kepentingan individu elit Pemuda Pancasila akan mewarnai kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyangkut kepentingan ekonomi. Sementara bagi Syamsul Arifin, akan mendapatkan kepentingan untuk sponsor politik seperti dukungan keamanan, jaringan kelompok masyarakat, dan memperoleh bantuan dana. Teori yang relevan terkait dengan kondisi tersebut adalah teori Hidayat tentang kepentingan terselubung (*hidden autonomy*) yaitu kepentingan individual (*individual interest*) dalam politik lokal (Hidayat, 2000).

Kebijakan desentralisasi yang menguatkan demokrasi dan menekankan pentingnya partisipasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Smith, tidak terjadi dalam proses pencalonan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Smith menjelaskan bahwa persamaan hak politik (*political equality*) dalam pelaksanaan desentralisasi, diharapkan akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal (Smith, 1985). Tetapi, studi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala

daerah secara langsung hanya memberikan peluang partisipasi yang lebih otonom kepada para aktor lokal yang menjadi politisi, birokrat, pengusaha, dan pengelola media cetak di Sumatera Utara.

Signifikansi studi ini adalah mengonfirmasi asumsi teoritis Masaaki dan Rozaki (2006) tentang kelompok kekerasan Sidel (2005) tentang *Local Bossism*. Masaaki dan Rozaki menjelaskan bahwa fenomena keberadaan kelompok kekerasan non-negara terjadi bukan karena negara yang mengizinkannya tetapi karena negara yang tidak bisa menolak keberadaannya, atau lebih tepatnya, negara yang membutuhkannya. Struktur negara yang demikian itu akan menciptakan kondisi bagi muncul, bertahan, dan berhasilnya kelompok kekerasan itu. Teori Masaaki dan Rozaki relevan dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang dikuasai negara di tingkat lokal (*local government resources*), Pemuda Pancasila Sumatera Utara harus memberikan jasa perlindungan keamanan di wilayah kekuasaan para penyelenggara negara.

Perlindungan keamanan tersebut dilakukan dengan cara membangun jaringan patronase baru kepada para kelompok masyarakat yang berpengaruh di daerah. Sementara, para penyelenggara negara di Sumatera Utara juga membutuhkan Pemuda Pancasila untuk keberlangsungan kekuasaannya di daerah. Hubungan yang saling menguntungkan antara kelompok kekerasan dengan negara semakin subur ketika konsep *governance* yang menekankan pemerintah memberikan kesempatan partisipasi yang sama bagi semua kelompok masyarakat.

Peran Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang melakukan intimidasi dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara muncul dengan kekuatan pengaruh para tokoh atau sesepuhnya. Teori Sidel tentang bosisme memiliki persamaan dan perbedaan dalam menjelaskan fenomena munculnya bos lokal dari hasil studi ini. Berdasarkan kasus peran Pemuda Pancasila dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara, persamaan teori Sidel adalah munculnya

para “Bos Lokal” yaitu tokoh, sesepuh dan para ketua Pemuda Pancasila sebagai bosome dalam ungkapan Sidel. Studi ini menunjukkan bahwa “Bos” atau sebutan “Ketua” Pemuda Pancasila sebagai *predatory broker* politik yang memiliki kontrol terhadap kekuatan pemaksaan dan sumber daya ekonomi dalam wilayah Sumatera Utara. Sumber kekayaan tokoh pemuda Pancasila di Sumatera Utara berasal dari sumber-sumber negara setelah memperoleh akses ekonomi berupa keistimewaan tertentu yang diberikan pejabat terpilih yang berhutang budi atas jasa mereka dalam memobilisasi dukungan dengan cara intimidasi kepada pemilih dalam pemilihan gubernur.

Perbedaannya adalah kekuasaan lokal di Sumatera Utara tidak bisa dimonopoli oleh para tokoh Pemuda Pancasila, seperti para *bossisme* di Filipina dan *chao pho* di Thailand. Selain tokoh Pemuda Pancasila, terdapat beberapa kelompok kekerasan lainnya yang memiliki pengaruh di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada saat pemilihan gubernur di Provinsi Sumatera Utara, masing-masing kelompok yang sama seperti Pemuda Pancasila, mendukung calon gubernur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak ada kelompok kekerasan yang dominan dapat mempengaruhi masyarakat di Sumatera Utara.

Teori Sidel tentang bosome juga menyebutkan bahwa dalam bosome posisi negara itu kuat. Fenomena munculnya bosome tidak terkait dengan lemahnya negara, tetapi terkait dengan beroperasinya bayangan rezim daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat, bos-bos-bos partai, pengusaha, militer, dan preman. Penelitian ini menjelaskan posisi negara itu kuat. Para tokoh, ketua dan sesepuh Pemuda Pancasila membutuhkan pejabat birokrasi bahkan bupati/walikota untuk mempertahankan relasi kekuasaan dengan para elit penyelenggara negara, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, kemunculan para bos lokal di Sumatera Utara dibatasi oleh kekuasaan negara pada tingkat lokal.

Tentang model relasi jaringan yang terjadi antara birokrat, bos-bos partai, dan pengusaha, Sidel mengungkapkan bahwa

penyanggah utamanya bukan berdasarkan hubungan patron-klien. Studi ini menjelaskan bahwa hubungan tersebut dilakukan atas dasar saling menguntungkan atau *simbiosis mutualisme* di antara tokoh Pemuda Pancasila dengan para politisi, birokrat, dan pengusaha. Dalam hubungan seperti ini keduanya berada pada posisi seimbang disebabkan oleh kepentingan yang sama di antara masing-masing pihak. Itulah yang disebut dengan jaringan patronase baru yang dicirikan oleh koalisi di antara para tokoh yang saling memanfaatkan lembaga politik lokal untuk mendapatkan akses kekuasaan dan sumber daya negara di tingkat lokal.

Atas dasar temuan-temuan dan implikasi teoritis yang telah dikemukakan, maka studi ini mengajukan perspektif teoritis baru dalam konteks lokal tentang kelompok kekerasan yang mampu memanfaatkan lembaga politik lokal di Sumatera Utara. Perspektif teoritis yang ditemukan disebut teori “Jaringan Patronase Baru Bos Lokal”. Meskipun fenomena munculnya kelompok kekerasan di beberapa wilayah di Indonesia memiliki kesamaan, tetapi beberapa perbedaan ditemukan dari hasil studi ini. Kontribusi terhadap perspektif teori Ilmu Politik yang ditemukan dalam studi ini mengidentifikasi fenomena yang spesifik tentang kelompok kekerasan dan bos lokal di Sumatera Utara.

Pertama, kekuasaan lokal tidak dimonopoli oleh satu kelompok kekerasan maupun seorang individu “bos lokal” di Sumatera Utara. Kemunculan kelompok kekerasan dan bos lokal di Sumatera Utara tersebar dalam kelompok masyarakat lainnya melalui pola-pola tertentu yang mungkin saja sama atau berbeda. Mereka relatif lebih berkuasa dalam komunitasnya dengan cara menerapkan bentuk patrimonialisme baru (*new patrimonialism*) dan pola hubungan patron klien piramida (*patron-client pyramid*). Sebutan “ketua” selalu digunakan oleh para klien untuk memanggil para bos atau patron yang dikenal sebagai tokoh kelompok kekerasan di Sumatera Utara.

Kedua, sumber-sumber kekuasaan yang diperoleh para ketua kelompok kekerasan di tingkat lokal tersebut berasal dari

kekuatan fisik dan kekayaan. Sumber kekuatan fisik dan kekayaan itu digunakan untuk membangun jaringan patronase baru yang ditandai oleh adanya koalisi saling menguntungkan antara para elit yang menduduki jabatan pimpinan partai politik, anggota parlemen, pejabat pemerintah, dan pengusaha lokal. Jaringan patronase baru menjadi tumbuh subur pada saat pelaksanaan otonomi daerah dikendalikan oleh konstelasi kekuasaan dan kepentingan elit tertentu..

Ketiga, perspektif teori Jaringan Patronase Baru Bos Lokal menjelaskan bahwa untuk mempertahankan pengaruhnya kepada masyarakat, tokoh Pemuda Pancasila Sumatera Utara harus mendekati media massa lokal. Media massa dianggap sebagai salah satu kelompok masyarakat (*civil society*) yang dapat membuat citra positif tokoh Pemuda Pancasila dalam program-program organisasi yang dilakukan. Intimidasi seperti ancaman untuk memukul fisik bahkan melukai yang sering dilakukan dalam aktivitas Pemuda Pancasila Sumatera Utara harus diiringi dengan tindakan amal seperti membantu warga miskin untuk kesehatan dan pendidikan. Tindakan amal yang dilakukan itu menjadikan para ketua kelompok kekerasan itu sebagai “warga masyarakat terhormat” dan dikenal sebagai tokoh masyarakat. Tindakan itu pula yang harus dipublikasikan melalui media massa lokal.

Keempat, para tokoh Pemuda Pancasila memiliki modal politik, ekonomi dan jaringan yang semakin kuat pada masa otonomi daerah diterapkan di Sumatera Utara. Keterlibatan para tokoh Pemuda Pancasila untuk mendukung salah satu calon Gubernur Sumatera Utara dalam pemilihan langsung merupakan bentuk partisipasi otonom yang dimiliki oleh elit individu di tingkat lokal. Situasi itu berlangsung pada saat masyarakat masih sulit memahami akan arti pentingnya *political equality* dalam pelaksanaan desentralisasi.

SIMPULAN

Praktik intimidasi yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara terlihat dalam setiap tahapan pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Pada saat memberikan dukungan kepada calon gubernur yang ingin dimenangkan, intimidasi yang dilakukan adalah secara internal mengancam anggota organisasi berupa pemecatan dan ancaman pemukulan fisik bagi kader Pemuda Pancasila yang tidak mendukung calon gubernur yang ingin dimenangkan. Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila dalam pemilihan gubernur adalah memerintahkan kader yang menjadi anggota legislatif untuk mendukung Syamsul Arifin sebagai calon gubernur. Sedangkan secara eksternal, anggota Pemuda Pancasila di lingkungannya masing-masing mengawasi para pemilih untuk memilih Syampurno dan memberi ancaman fisik kepada pemilih yang tidak memilih Syampurno.

Pola mobilisasi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila untuk menggerakkan potensi organisasi dalam mendukung kandidat gubernur dilakukan atas dasar patron-klien piramida yaitu seorang tokoh Pemuda Pancasila memiliki kekuatannya sendiri untuk menggerakkan anggota Pemuda Pancasila. Model relasi jaringan yang terjalin antara Pemuda Pancasila dengan birokrasi, pengusaha, dan media cetak lokal dilakukan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Relasi jaringan dengan birokrasi, pengusaha, serta media lokal dilakukan dengan cara-cara yang beragam, saling mengait, dan penuh intrik untuk mempertahankan akses kekuasaan dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dikuasai.

Relasi yang terjalin antara Pemuda Pancasila dengan birokrasi, pengusaha, dan media cetak lokal itu dilakukan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan. Pemuda Pancasila menginginkan tetap memperoleh akses mendapatkan sumber-sumber daya yang dikuasai negara di tingkat lokal (*local government resources*). Sementara para pejabat birokrasi, pengusaha, dan pengelola media cetak lokal membutuhkan kekuatan Pemuda Pancasila untuk mempertahankan kekuasaan dan usaha mereka seperti menghindari ancaman dan menjaga keamanan di lokasi-lokasi kekuasaan dan usaha mereka. Perspektif teoritis baru

yang ditemukan dalam konteks lokal pada penelitian ini disebut sebagai teori “Jaringan Patronase Baru Bos Lokal” yaitu kelompok kekerasan yang mampu memanfaatkan lembaga politik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrain, C.F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bogdan, R. & Taylor J. Steven. 1993. *Metode Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Budiardjo, M. “Konsep Kekuasaan: Tinjauan Pustaka”. dalam: Budiardjo. 1984. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Gramedia.
- Crook, R.C. and James Manor. 1998. *Democracy and Decentralization in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance*. Cambridge University Press.
- Gramsci, A. 1971. *Selections from Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.
- Hadiz, V.R. 2005. *Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. LP3ES. Jakarta.
- Hidayat, S. “Desentralisasi dan Otonomi Daerah Masa Orde Baru (1966-1998)”. dalam: Soetandyo Wignosubroto dkk. 2000. *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa.
- Lively, J. 1975. *Democracy*. Britain: Basil Blackwell.
- Masaaki, O. dan Abdur Rozaki. Ed. 2006. *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*. Yogyakarta: IRE Press.
- Prasojo, E., Irfan Maksum, dan Teguh Kurniawan. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. 2006. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Rauf, M. 2005. *Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi.
- Scott, J.C. 1972. “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia”. dalam: *The American Political Science Review*. 6(1)
- Sidel, J.T. 2005. “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand, dan Indonesia”. dalam: John Harris, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist. (Eds.). *Politikasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.
- Smith, B.C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: Allen & Unwin.
- Yin, K. R. 2000. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.